

MENELUSUR ANOMALI PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, PDRB SEKTOR INDUSTRI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KETIMPANGAN

Andi Lopa Ginting¹, Andi Faisal Anwar², Jony Puspa Kusuma³

Universitas Terbuka, UPBJJ Malang
andi.lopaginting@ecampus.ut.ac.id

Submitted: 18th Aug 2021/ **Edited:** 25th Sept 2021/ **Issued:** 01st Oct 2021

Cited on: Ginting, A. L., Anwar, A. F., & Kusuma, J. P. (2021). MENELUSUR ANOMALI PERTUMBUHAN EKONOMI, INVESTASI, PDRB SEKTOR INDUSTRI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KETIMPANGAN. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 4(4), 784-794.

ABSTRACT

Economic growth from year to year continues to move impressively in Makassar City. However, at the same time, economic growth and income distribution have been unbalanced, which has exacerbated the number of economic inequalities that have occurred. The entry of investment, the contribution of the industrial sector and the minimum wage, did not make any significant changes to reduce economic inequality. The purpose of this research is to factually attempt to understand further the effect of investment, economic growth, industrial sector GDP, and minimum wages on the Gini ratio in Makassar City. This study used a kualitative method research model. The novelty of this research is that the search related to economic inequality in Makassar City does not just stop at statistical figures. However, there is also a qualitative in-depth search to understand the real phenomenon of inequality. The results of this study indicate that investment and economic growth as independent variables have a positive effect on the Gini ratio (dependent variable). On the other hand, industrial sector GRDP and minimum wage (independent variable) have no effect on the Gini ratio. Behind the stretch of investment, growth, and the contribution of the industrial sector, these vulnerable poor people get nothing. This growth benefits the middle class more, so that class inequality is increasingly gaping. The loss of income sources in the villages, the low skills and education they have are the main triggers for the low level of income they have. Suggestions and implications of this research are that the Makassar City government should re-design a more inclusive economic growth.

Investation : Inequality; Economic Growth; Industrial Sector GRDP, Minimum Wage

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan di Kota Makassar. Namun disaat yang sama, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan justru berjalan timpang. Angka gini ratio Kota Makassar dari tahun 2010 mencapai 0,374, dan terus meningkat hingga tahun 2019 yang menembus angka 0,390. Bahkan

angka gini ratio Kota Makassar, diatas Provinsi Sulawesi Selatan dan nasional. Angka tersebut dapat dikatakan jauh dari kata baik. Disisi lain, merujuk pada tren economic growth lima tahun kebelakang, nampaknya menunjukkan tren peningkatan dari waktu ke waktu. Di tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebesar 6,83 persen, lalu meningkat menjadi 8,79 persen di tahun 2019, bahkan mampu menembus angka 8,79 persen di tahun 2019 (BPS Sulsel, 2020). Kondisi ini mengafirmasi terjadinya ketidakmerataan pendapatan, dibalik pertumbuhan ekonomi yang begitu impresif. Dengan kata lain, terjadinya pertumbuhan yang eksklusif justru menciptakan masalah baru di kota ini, padahal Kota Makassar diharapkan mampu menjadi sentrum pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Sulawesi Selatan.

Visi pemerataan pendapatan ini merupakan suatu usaha berkelanjutan yang dijalankan oleh pemerintah Kota Makassar, untuk memberikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Namun, pertumbuhan yang eksklusif tersebut nampaknya telah menimbulkan ketimpangan pendapatan. Dimana, orang kaya kian semakin kaya, sementara penghidupan orang miskin tidak mengalami perbaikan yang cukup berarti. Kondisi ini muncul, disebabkan karena terdapatnya kecenderungan bahwa kebijakan pembangunan yang selama ini hanya berorientasi pertumbuhan ekonomi, yang bersifat eksklusif hingga mempertajam tingkat ketimpangan yang terjadi. Barometer kesuksesan pembangunan ekonomi pada prinsipnya adalah upaya yang ditempuh untuk mengakselerasi pendapatan masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi hidup dibawah garis kemiskinan. Dengan kata lain terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas.

Dari angka gini ratio tersebut, menunjukkan bahwa angka ketimpangan di Kota Makassar sangat tinggi. Hal ini menandakan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat masih jauh dari kata baik. Isu ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi, menjadi barometer bagi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pembangunan yang baik, tentu mengindikasikan angka ketimpangan yang rendah dan dibarengi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, seringkali hal tersebut justru menjadi anomali tersendiri, dalam praktik pembangunan ekonomi wilayah. Untuk itu semua daerah, mencoba untuk menangani hal ini secara serius, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih sejahtera.

LANDASAN TEORI

Dalam tinjauan teoritik maupun secara empiris, hasil riset yang ada menggambarkan bahwa angka ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi bisa saja berbanding lurus. Dengan kata lain, ketika pertumbuhan ekonomi semakin tinggi, bisa saja mengakibatkan sentralisasi peningkatan pendapatan hanya terjadi pada level menengah keatas. Sementara masyarakat level terendah, tidak mengalami perbaikan peningkatan pendapatan yang berarti, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi, hanya dirasakan oleh segelintir orang saja. Begitupun juga sebaliknya, ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan juga dapat memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Hal ini terjadi pada daerah yang memiliki pembangunan ekonomi yang berjalan cukup inklusif atau dengan tingkat pemerataan pendapatan yang jauh lebih baik.

Investasi merupakan salah satu elemen penting dari aktivitas ekonomi sebab investasi berkaitan dengan masa depan kegiatan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan produksi yang berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya tenaga kerja memperoleh upah dan meningkatkan pendapatan tenaga kerja tersebut. Dengan demikian, akan terjadi sirkulasi secara terus menerus sehingga tingkat investasi yang digunakan untuk membuat produksi barang dan jasa, akan lebih banyak lagi. Demikian halnya Foreign Direct Investment (FDI) juga dapat berpengaruh secara jangka pendek maupun jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Handoyo, et.al 2020; Hendarmin, 2019).

Adanya investasi akan berkontribusi besar dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mampu mereduksi tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi. Manakala investasi pada suatu daerah bertambah atau meningkat, hal ini dikarenakan investasi dapat menciptakan lapangan kerja baru. Namun distribusi investasi yang tidak merata di Kota Makassar tentu akan berdampak pada ketimpangan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja di Kota Makassar. Penanaman modal dalam bentuk investasi dalam negeri maupun dari luar negeri dapat berkontribusi yang nyata, dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga mampu mengurangi angka ketimpangan pendapatan. Namun yang terjadi, data investasi di Kota Makassar mengalami fluktuasi tiap tahunnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penyebaran investasi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Kota Makassar tentu akan berdampak pada kesenjangan pendapatan dalam menyediakan lapangan kerja di Kota Makassar.

Investasi di Kota Makassar pada tahun 2010, memiliki total investasi sebesar Rp.396 milyar, lalu meningkat ditahun 2011 menjadi Rp.1.28 triliun, hingga pada tahun 2019, kembali meningkat sebesar Rp.1.40 triliun. Dari data investasi tersebut mengkonfirmasi bahwa terjadi peningkatan investasi dari tahun ke tahun di Kota Makassar. Adapun yang menjadi pemantik dari hal ini adalah membaiknya sektor perdagangan di kota ini, yang menjadikan di Kota Makassar sebagai sentrum perdagangan. Selain itu, sektor industri pengolahan juga ikut terus bertumbuh. Dimana sektor ini banyak berkontribusi menarik capital inflow ke kota ini, sehingga aliran investasi semakin membesar dari waktu ke waktu (Dinas Penanaman Modal Kota Makassar, 2018).

Pertumbuhan PDRB Sektor Industri di Kota Makassar dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, menunjukkan bahwa setiap tahunnya PDRB Sektor Industri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010, terdapat peningkatan PDB Sektor Industri di Kota Makassar sebesar Rp.12, 56 miliar dan terus meningkat hingga pada tahun 2019 mencapai Rp. 22, 72 miliar rupiah. Dapat dilihat selama periode 2010 hingga 2019, PDRB Kota Makassar atas dasar harga konstan menunjukkan perkembangan yang cukup baik dikarenakan sektor industri memberikan kontribusi besar terhadap PDRB kota Makassar (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2018).

Pendapatan yang timpang muncul sebagai akibat tidak layakannya pengupahan bagi tenaga kerja. Orang-orang yang telah menjadi pekerja menginginkan pengupahan yang benar-benar mensejahterahkan bagi kehidupan pekerja. Upah memainkan peran yang begitu strategis untuk perbaikan kehidupan kelas pekerja. Sistem pada pengupahan pada prinsipnya, sebaiknya mampu memberikan jaminan kehidupan yang lebih sejahtera bagi seluruh kelas pekerja. Memasuki tahun 2010, UMK tahunan di Kota Makassar mencapai Rp. 1.0000.000, lalu merangkak naik di tahun berikutnya hingga mencapai Rp. 1.100.000. Pada tahun 2019 angka tersebut mampu menembus Rp. 2.941.270 (Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2020). Isu perbaikan upah minimum, pada dasarnya adalah isu yang cukup klasik dan tidak berhenti untuk diperdebatkan, antara produsen dengan pekerja. Manakala tingkat upah minimum dianggap terlalu besar, maka hal tersebut dapat berdampak pada tingginya biaya produksi. Dalam hal ini produsen, tidak begitu diuntungkan dalam situasi ini.

Sebaliknya, jika upah minimum terlalu rendah atau kurang layak bagi pekerja, maka hal ini menggerus pendapatan kelas pekerja, sehingga golongan pekerja yang berpendapatan rendah kesenjangannya semakin timpang, dengan golongan masyarakat berpendapatan tinggi.

Holifah (2017) mencoba menelusur penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan pada level Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015. Dalam temuannya, ia menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi interelasi yang bersifat negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut. Demikian halnya di China, pembangunan sektor infrastruktur transportasi yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh pada ketimpangan ekonomi (Banerjee, et.al, 2020).

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah dengan menggunakan mix-method. Menurut Creswel (2014) mix-method merupakan sebuah model proses metodologis dengan mengkombinasi metode quantitative research dan qualitative research. Adapun model analisa kuantitatif dalam penelitian ini ditopang atas bangunan teoritik, hipotesis dan justifikasi riset terdahulu, baik yang sejalan maupun yang tidak sejalan dengan riset ini. Untuk memproduksi hasil analisis yang mendalam untuk riset ini, maka dilakukan pengumpulan data primer maupun data sekunder dalam memahami anomali pertumbuhan ekonomi, investasi, kontribusi sektor industri dan upah minimum terhadap fenomena ketimpangan yang terjadi di Kota Makassar. Untuk menyentuh hal-hal bersifat kualitatif, maka penelusuran terhadap fenomena yang terjadi, terkait variabel penelitian, dilaksanakan dengan model wawancara mendalam (indepth-interview) dan analisis dokumen terkait, serta penelusuran terhadap stakeholder penting sehingga analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan lebih informatif.

HASIL PENELITIAN

Pengaruh investasi (X1) berpengaruh terhadap gini ratio di Kota Makassar (Y)

Merujuk pada tabel Model Summary nampak bahwa nilai R yang ada adalah 0,646 atau 64,6%, menurut pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk

kedalam kategori korelasi berpengaruh tinggi, karena berada pada interval 0,6 – 1,0. Hal ini menunjukkan bahwa variabel investasi berpengaruh tinggi terhadap gini ratio. Merujuk pada nilai konstanta yang ada, menandai bahwa jika nilai investasi konstan, maka nilai gini ratio sebesar 0,362. Dilihat dari output koefisien hasil regresi linear berganda, maka nampak bahwa variabel investasi memiliki nilai koefisien sebesar 1,727 yang dapat diartikulasikan bahwa jika nilai investasi naik sebesar 1 persen, maka nilai gini ratio pun juga akan bergerak naik sebesar 1,727. Sementara nilai t hitung menunjukkan angka sebesar 2,395 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,262. Nilai signifikansi menunjukkan angka 0,044 dibawah dari standar 0.05, yang berarti bahwa variabel investasi berpengaruh positif signifikan terhadap gini ratio. Dengan demikian, relasi antara investasi dan gini ratio bersifat positif signifikan, dimana kenaikan tingkat investasi diikuti dengan kenaikan gini ratio.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi (X2) berpengaruh terhadap gini ratio di Kota Makassar (Y).

Berdasarkan tabel Model Summary nampak bahwa nilai R yang ada adalah 0,640 atau 64,0%, dalam pedoman interpretasi koefisien korelasi, angka ini termasuk kedalam kategori korelasi berpengaruh tinggi, karena berada pada interval 0,6 – 1,0. Hal ini menggambarkan bahwa variabel investasi memiliki pengaruh yang tinggi terhadap gini ratio. Berdasarkan nilai konstanta tersebut, menjelaskan bahwa jika nilai pertumbuhan ekonomi konstan, maka nilai gini ratio sebesar 0,640. Berangkat dari output koefisien hasil regresi linear berganda, maka dapat dikatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai koefisien sebesar 0,012 yang dapat dimaknai bahwa jika nilai pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen, maka nilai gini ratio pun juga akan bergerak naik sebesar 0,012. Sementara nilai t hitung menunjukkan angka sebesar 2,356 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,262. Nilai signifikansi menunjukkan angka 0,046 dibawah dari standar 0.05. Dengan demikian, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan gini ratio menunjukkan hubungan yang positif signifikan, dengan kata lain tingkat pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan kenaikan gini ratio.

Pengaruh PDRB sektor industri (X3) berpengaruh terhadap gini ratio

Berdasarkan uji koefisien determinasi diatas, nilai R square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas, dalam menerangkan variabel terikat. Dari tabel diatas, diketahui R square sebesar 0,347, hal ini

berarti bahwa 34,7 persen yang menunjukkan bahwa gini ratio dipengaruhi oleh PDRB sektor industri. Sisanya sebesar 66,3 persen dipengaruhi oleh variabel lain, yang belum diteliti dalam penelitian ini. Mengamati nilai konstanta pada variabel ini, mengafirmasi bahwa jika nilai PDRB sektor industri konstan, maka nilai gini ratio sebesar 0, 589. Adapun output koefisien hasil regresi linear berganda yang ada, menunjukkan bahwa variabel PDRB sektor industri memiliki nilai koefisien sebesar 2, 493 yang menunjukkan bahwa jika nilai PDRB sektor industri naik sebesar 1 persen, maka disaat yang sama nilai gini ratio pun juga akan bergerak naik sebesar 2, 493. Sementara nilai t hitung menunjukkan angka sebesar 2, 062 yang lebih kecil dari t tabel yakni 2,262. Nilai signifikansi menunjukkan angka 0,073 diatas dari standar 0.05. Dengan demikian, PDRB sektor industri tidak berpengaruh terhadap gini ratio.

Pengaruh upah minimum (X4) berpengaruh terhadap gini ratio di Kota Makassar

Berangkat dari uji koefisien determinasi yang ada, nilai R square dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen, dalam menerangkan variabel dependen. Dari tabel diatas, diketahui R square sebesar 0,351 hal ini berarti bahwa 35,1 persen yang menunjukkan bahwa gini ratio dipengaruhi oleh upah minimum. Sisanya sebesar 65,9 persen dipengaruhi oleh variabel lain, yang belum diteliti dalam penelitian ini. Menilik nilai konstanta variabel upah minimum, menerangkan bahwa jika nilai upah minimum konstan, maka nilai gini ratio sebesar 0, 361. Adapun output koefisien hasil regresi linear berganda yang ada, menunjukkan bahwa variabel upah minimum memiliki nilai koefisien sebesar 1, 248 yang menunjukkan bahwa jika nilai PDRB sektor industri naik sebesar 1 persen, maka capaian nilai gini ratio juga akan bergerak naik sebesar 1, 248. Sementara nilai t hitung menunjukkan angka sebesar 2,080 yang lebih kecil dari t tabel yakni 2, 262. Nilai signifikansi menunjukkan angka 0,071 diatas dari standar 0.05. Dengan demikian, upah minimum tidak memiliki pengaruh terhadap gini ratio (Normalitasari, 2012).

Determinasi investasi terhadap gini ratio

Temuan dalam riset ini menemukan bahwa variabel investasi berpengaruh positif signifikan terhadap gini ratio. Semakin tinggi tingkat investasi yang ada, nampaknya justru mengakibatkan ketimpangan itu semakin tinggi. Artinya, investasi yang ada di Kota Makassar bersifat eksklusif, dimana hanya menguntungkan kelas menengah,

sehingga gap antara golongan kaya dan miskin justru semakin menganga (Puspasari, 2018).

Determinasi pertumbuhan ekonomi terhadap gini ratio

Berangkat dari hasil penelitian ini, ditemukan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan gini ratio menunjukkan hubungan yang positif. Dengan kata lain, tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kenaikan gini ratio. Dalam temuannya, ia menggarisbawahi bahwa pembangunan wilayah yang terjadi di berbagai daerah mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memicu peningkatan pendapatan sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat dengan pola yang lebih distributif, khususnya bagi golongan pekerja dengan pendapatan rendah. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi tersebut justru mampu mereduksi angka ketimpangan ekonomi yang terjadi (Muara, 2015).

Determinasi PDRB sektor industri terhadap gini ratio

Mencermati hasil penelitian ini, ditemukan bahwa PDRB sektor industri tidak berpengaruh terhadap gini ratio. Aktifitas sektor industri yang berjalan di Kota Makassar tidak berpengaruh dalam menurunkan tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi. Meski kontribusi sektor sangat besar dalam membentuk pertumbuhan ekonomi Kota Makassar, namun tidak berpengaruh terhadap penurunan angka gini ratio. Dengan kata lain aktifitas sektor ini hanya dinikmati segelintir orang saja. Hal ini sejalan dengan temuan Chesters (2016), Morck, et.al (2000), Bagchi dan Svejnar (2015) yang menjelaskan bahwa aktifitas para industrialis menggiring perekonomian menjadi eksklusif, perbaikan pendapatan dan kesejahteraan hanya terkonsentrasi pada kalangan elit, sehingga golongan pendapatan bawah tidak merasa dampak dari aktifitas industri ini secara nyata. Aktifitas sektor industri harusnya menciptakan share income yang besar bagi masyarakat miskin, sehingga ketimpangan yang terjadi dapat direduksi (Smith, M. et al. 2019; Wu, et al. 2014). Posisi ini benar-benar tidak menguntungkan kelas bawah. Demikian hal yang dikonfirmasi oleh Piketty (2014) dan Bank Dunia (2015) bahwa satu persen orang terkaya di dunia ini memiliki kekayaan yang setara dengan setara setengah kekayaan global, dikuasai oleh kelompok kaya tersebut (Rahman, 2018). Tingkat kesejahteraan justru semakin menjauh dari kalangan pendapatan terbawah, yang dibuktikan dengan tingkat gini ratio yang berada pada kisaran 0,3 hingga 0,5. Dampaknya perekonomian global kian menjadi semakin

timpang. Fundamental pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh sektor industri, cenderung lebih semakin menguatkan produktifitas dan kesejahteraan kelas menengah (Ozturk, 2016; Wahyuni, dkk. 2014).

Determinasi upah minimum terhadap gini ratio

Mengacu pada hasil temuan penelitian ini, ditemukan bahwa upah minimum tidak berpengaruh terhadap gini ratio. Maksudnya, meningkatnya upah minimum di Kota Makassar dari waktu ke waktu, justru tidak mampu menurunkan angka ketimpangan ekonomi yang terjadi. Kebijakan kenaikan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah, untuk memperkecil gap ketimpangan pendapatan yang ada, tidak menciptakan perubahan yang berarti bagi penurunan angka ketimpangan yang ada di Kota Makassar.

Penghidupan Ekonomi Orang Miskin Dan Kelas Menengah Atas di Kota Makassar

Melihat fenomena penghidupan ekonomi di atas menunjukkan bahwa penghidupan masyarakat miskin menunjukkan kondisi kerentanan terhadap penghidupan mereka. Mereka cukup mudah terjerumus dalam berbagai macam masalah sosial dan ekonomi. Bahkan disaat perekonomian Kota Makassar bertumbuh dengan impresif, dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan, akan tetapi mereka tetap saja tidak dapat keluar dari jurang kemiskinan. Penghidupan ekonomi mereka tidak berubah, bahkan semakin memburuk. Hal ini digarisbawahi oleh tanggapan dalam wawancara, yang mengacu pada permasalahan kaum rentan ini. Dimana mereka kehilangan sumber penghasilan di pedesaan sehingga memilih bekerja di kota, dengan segala konsekuensinya.

Di perkotaan mereka mempunyai pekerjaan yang tidak menentu, dan diperparah kurangnya lapangan pekerjaan secara umum. Dampaknya, mereka rela bekerja serabutan. Mereka benar-benar kekurangan pendapatan, sementara mereka punya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya. Di perkotaan mereka tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan, rata-rata kaum rentan ini memiliki pendidikan dan skill yang sangat terbatas. Tidak tamat SD, tamat SD dan hingga tamat SMP. Mereka tidak dapat terjaring di pasar tenaga kerja yang ada. Investasi yang masuk di Kota Makassar, mensyaratkan skilled labour sebab perekonomian Kota Makassar

bertumpu pada sektor industri pengolahan, yang notabene tidak membutuhkan unskill labour.

Demikian halnya, dengan upah minimum yang ada, hanya dinikmati oleh pekerja formal, sehingga pada posisi ini tentunya pekerja informal tidak termasuk didalamnya. Pada akhirnya perekonomian terus bergerak dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bersifat eksklusif, yang tidak mampu berkontribusi banyak terhadap penghidupan masyarakat miskin perkotaan. Sebaliknya, yang merasakan benefit dari pertumbuhan itu lebih banyak terkonsentrasi pada middle class, yang notabene selama ini menguasai jalannya perekonomian di Kota Makassar.

KESIMPULAN

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan dengan pendekatan mix method ini, maka dapat dikemukakan dengan dua pendekatan hasil temuan. Pertama, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui regresi linear berganda, yang memotret pengaruh investasi, PDRB sektor industri, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap gini ratio di Kota Makassar selama satu dekade terakhir. Maka ditemukan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen, berpengaruh positif terhadap gini ratio (variabel dependen) di Kota Makassar. Sebaliknya, PDRB sektor industri dan upah minimum (variabel independen) tidak berpengaruh terhadap gini ratio. Hal ini menandai bahwa indikator makroekonomi Kota Makassar menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif, dimana investasi, economic growth, kontribusi sektor industri dan upah minimum yang ada di Kota Makassar, tidak berpengaruh dalam mereduksi tingkat ketimpangan ekonomi yang terjadi di kota ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Banerjee, A., Duflo, E. and Qian, N. (2020). On the road: Access to transportation infrastructure and economic growth in China', *Journal of Development Economics*. Elsevier B.V., 145, pp. 1–80.
- Bagchi, S., Svejnar, J. (2015). Does wealth inequality matter for growth? The effect of billionaire wealth, income distribution, and poverty. *J. Comp. Econ.* 43 (3), 505530.
- Rahman, H. (2018). Potret Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Dan Kemiskinan Di Indonesia Dalam Tinjauan Ekonomi Politik Pembangunan. *Ilmu dan Budaya*, 40(55).

- Chesters, J. (2016). Trends in economic growth and levels of wealth inequality in G20 nations: 2001-2013. *Contemp. Soc. Sci.* 11, 270-281.
- Creswel, J. W. (2014). *Research Design : Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches Research Design*.
- Handoyo, R. D., Erlando, A. and Septiyanto, I. (2020). Dampak Faktor Eksternal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), p. 1.
- Hendarmin, H. (2019). Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Aglomerasi, dan Modal Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), pp. 245–271.
- Holifah. (2017). Faktor-Faktor Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2015. Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ozturk, A. (2016). Examining the economic growth and the middle-income trap from The perspective of the middle class. *Int. Bus. Rev.* 25 (3), 726-738.
- Morck, R., Stangeland, D., Yeung, B. (2000). Inherited wealth, corporate control, and economic growth: the Canadian disease? In: Morck, R.K. (Ed.), *Concentrated Corporate Ownership*. University of Chicago Press, Chicago, pp. 319-371.
- Muara, Nangarumba. (2015). Analisis Pengaruh Struktur Ekonomi, Upah Minimum Provinsi, Belanja Modal, dan Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Seluruh Provinsi Di Indonesia Tahun 2005-2014. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Malang.
- Normalitasari, L. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi upah tenaga kerja industri kreatif kerajinan batik kayu di kec. krebet bantul provinsi DIY. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Piketty, T. 2014. Capital In The 21st Century. *American Economic Review*, 2015-aeaweb.org.
- Puspasari Windy Astuti. (2018). Analisis pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi (studi pada 33 provinsi di indonesia).
- Wahyuni, dkk. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal JESP*. Malang.
- Wu, J., Nash, C., Wang, D., (2014). Is high speed rail an appropriate solution to China's rail capacity problems? *J. Transp. Geogr.* 40, 100–111.
- Smith, M. et al. (2019). Capitalists in the twenty-first century', *Quarterly Journal of Economics*, 134(4), pp. 1675–1745.